

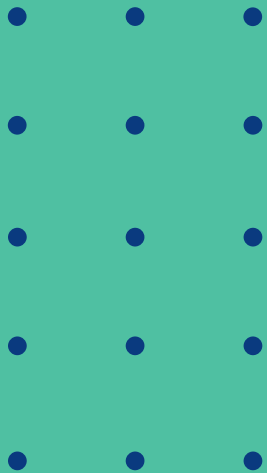


BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

LAPORAN

EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL



TRIWULAN I
Tahun 2024





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas perkenan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Evaluasi Program dan Anggaran Triwulan I Tahun 2024 pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat tersusun dengan baik.

Laporan ini disusun selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan anggaran, juga sebagai bentuk pendokumentasian kegiatan yang dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan. Oleh karenanya sumbangan kritik dan saran yang membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak terkait yang telah membantu dan ikut berpartisipasi dalam penyusunan ini, baik dalam proses persiapan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan, kami menyampaikan penghargaan, apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan semoga segala partisipasi dan upaya kita semua mendapat berkah dan ridha dari Allah SWT. Aamiin.

Jakarta, 31 Mei 2024

Kepala,



*R*Muhammad Aqil Irham



IKHTISAR EKSEKUTIF

BPJPH Kementerian Agama adalah unit Eselon I yang bertugas menjalankan peran dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPJPH Kementerian Agama pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp340.677.831.000,. Namun, dari jumlah tersebut, terdapat blokir administrasi dan *Automatic Adjustment* sebesar Rp55.445.751,000,-. Selain itu, BPJPH mendapatkan tambahan blokir administrasi sebesar Rp13.648.406.000,-, sehingga Pagu yang aktif digunakan sebesar Rp275.583.674.000,- atau 80,89%. Realisasi anggaran triwulan I Tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar Rp75.803.074.027,- atau 22,25% dari total pagu. Realisasi anggaran terbesar pada kegiatan Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal yaitu sebesar Rp59.285.918.297,- atau 25,73% dan realisasi anggaran terendah pada kegiatan Kerja Sama dan Standardisasi Halal yaitu sebesar Rp2.115.355.060,- atau 9,29%.

Pada Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program, terdapat 2 (dua) indikator yang telah memenuhi target sebesar 100% yaitu : Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan, dikarenakan pada program ini, kanal informasi pengaduan cukup memadai dan layanan konsultasi tatap muka melalui PTSP sebanyak 13.445 pengunjung. Selanjutnya, pada Sasaran Program 4: Meningkatkan kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal, dengan indikator kinerja: Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM. Pada program ini, capaian kinerja 100% dikarenakan waktu layanan sesuai aturan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja No 6 Tahun 2022 tentang tenggang waktu sertifikasi halal reguler dan self declare.

Capaian Rencana Kerja (Renja) pada triwulan I tahun 2024 dan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM, BPJPH telah menerbitkan sertifikat sebanyak 293.954 sertifikat atau 29,10% dari target 1.010.000 sertifikat, yang terdiri atas sertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian sebanyak 4.664 sertifikat dan sertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha sebanyak 289.290 sertifikat.

Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Triwulan I Tahun 2024 pada 2 (dua) Prioritas Nasional yang menjadi tugas dan fungsi BPJPH,

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Indikatornya ialah jumlah sertifikat halal yang telah terbit. Realisasi sertifikat halal terbit pada Triwulan I berjumlah 293.954 sertifikat.

2. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Indikatornya ialah jumlah industri halal yang difasilitasi dan dibina. Realisasi industri halal pada Triwulan I berjumlah 1.443 Industri.
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Indikatornya ialah persentase produk yang bersertifikat halal. Realisasi persentase produk halal yang tersertifikasi halal sebesar 98%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
A. Latar Belakang.....	1
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II PROFILE KELEMBAGAAN.....	4
A. Struktur Organisasi.....	4
B. Peta Wilayah Kerja.....	7
C. Data Pegawai.....	7
BAB III PERENCANAAN KINERJA PROGRAM & ANGGARAN TAHUN 2024.....	10
A. Perencanaan Anggaran Tahun 2024.....	10
B. Sasaran dan Indikator Program Tahun 2024	10
C. Rencana Kerja tahun 2024.....	11
D. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024	12
BAB IV CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024	15
A. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2024	15
B. Capaian Sasaran Program Triwulan I Tahun 2024	15
C. Capaian Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Tahun 2024	17
D. Capaian RKP Triwulan I Tahun 2024	21
BAB V KENDALA DAN TINDAK LANJUT.....	22
A. Kendala	22
B. Tindaklanjut/Rekomendasi	23
BAB VI PENUTUP.....	25
LAMPIRAN	26



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tujuan penyelenggaraan JPH adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Agama dibentuk berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Dalam menyelenggarakan JPH, BPJPH menjalankan tugas dan fungsinya yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta arahan Presiden Republik Indonesia Ir. H Joko Widodo bahwa Indonesia berpotensi sebagai pusat Industri Halal dunia sekaligus kiblat industri fashion dunia di tahun 2024. Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal dalam sertifikasi produk halal merupakan hal yang penting bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya di Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim untuk mencapai pusat industri halal dunia.

Pelaksanaan sertifikasi produk halal memerlukan kerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional dalam Jaminan Produk Halal. Sedangkan di dalam negeri, BPJPH juga melakukan sejumlah kolaborasi untuk memperkuat penyelenggaraan JPH dengan kolaborasi antara BPJPH bersama para *stakeholder* terkait, mulai dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, asosiasi usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Pelatihan, *Halal Center*/ Pusat Kajian Halal, dan lain sebagainya. BPJPH juga terus memperluas sinergitasnya dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat penyelenggaraan JPH.

Berbagai upaya dan terobosan strategis dilakukan BPJPH untuk melakukan percepatan sertifikasi produk halal, sekaligus memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Tujuannya, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat produsen produk halal nomor 1 di dunia. Berdasarkan hal tersebut,

BPJPH telah menyusun rencana program dan anggaran tahun 2024 yang meliputi: (1) program 1 juta sertifikat halal gratis melalui pernyataan halal pelaku usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil (*self declare*); (2) Sosialisasi sertifikasi halal melalui Wajib Halal Oktober (WHO) 2024; (3) Pembinaan dan pelatihan *stakeholder* JPH seperti Pendamping Proses Produk Halal (PPH), Auditor Halal, dan Penyelia Halal; (4) Mitigasi dan pengawasan JPH terpadu memperluas; (5) Akselerasi rekognisi produk halal impor; (6) Pendampingan Sertifikasi jasa penyembelihan pada Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia dan Rumah Potong Unggas (RPU); (7) Kerjasama dengan mitra strategis baik dari dalam maupun luar negeri; (8) Pengembangan aplikasi SiHalal melalui *Block Chain* dan *Artificial Intelligence* (AI); (9) Penguatan Program Prioritas/Direktif Kementerian Agama (Moderasi Beragama, Transformasi Digital dan Kehumasan); dan (10) Penguatan layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH.

Sepanjang Triwulan I tahun 2024, BPJPH melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja program dan anggaran serta pendampingan kepada unit kerja agar memahami indikator-indikator pada aplikasi monitoring dan strategi-strategi yang dapat dilakukan agar mendapatkan nilai optimal. Pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi program dan anggaran dilakukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana kerja dan anggaran. Laporan Evaluasi Program dan Anggaran BPJPH Triwulan I Tahun 2024 disusun dalam rangka mengevaluasi seluruh pelaksanaan kinerja program dan anggaran, serta mengidentifikasi permasalahan capaian kinerja untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut sebagai upaya perbaikan pelaksanaan anggaran dan program.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pengelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan 62 tahun 2023 tentang Perencanaan penganggaran, pelaksanaan penganggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Anggaran BPJPH Triwulan I Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai kinerja program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Anggaran Triwulan I Tahun 2024 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan BPJPH berdasarkan hasil evaluasi kinerja anggaran, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPJPH.

D. RUANG LINGKUP

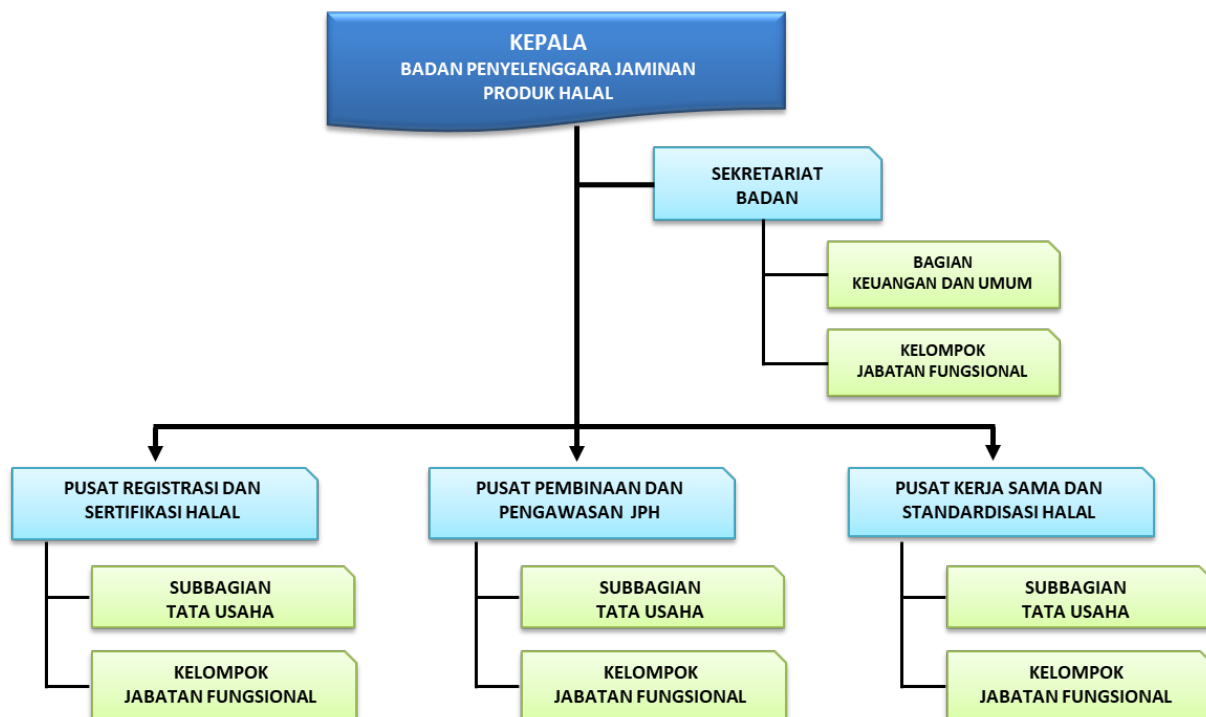
Ruang lingkup dan objek dari Laporan Evaluasi Program dan Anggaran BPJPH ini mencakup pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BPJPH Triwulan I Tahun Anggaran 2024 berdasarkan PMK 22 Tahun 2021 dan pencapaian kinerja organisasi.

BAB II

PROFILE KELEMBAGAAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas:



Gambar 1. Struktur Organisasi BPJPH

1. Sekretariat

- koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- pengelolaan urusan keuangan Badan;
- pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina pengembangan karir pegawai;
- koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang jaminan produk halal;
- penyusunan rancangan peraturan, perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;

- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan barang milik negara;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat Badan terdiri atas:

- 1. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keuangan dan Umum melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan pada Badan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada Badan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- d. pengelolaan dan pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
- e. pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara.

2. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- b. peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- c. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian; dan
- g. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal terdiri atas:

- 1. Subbagian Tata Usaha; dan
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data dan dokumentasi pusat.

Subbagian Tata Usaha secara fungsional berada di bawah Bagian Keuangan dan Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggungjawab kepada pusat.

3. Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
- b. peningkatan kualitas layanan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
- c. fasilitasi sarana prasarana, laboratorium halal, serta pendanaan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
- f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal; dan
- g. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data dan dokumentasi pusat.

Subbagian Tata Usaha secara fungsional berada di bawah Bagian Keuangan dan Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggungjawab kepada pusat.

4. Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal

- a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
- b. peningkatan kualitas layanan kerja sama dan standardisasi produk halal;
- c. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal;
- f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal; dan
- g. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan,

kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data dan dokumentasi pusat.

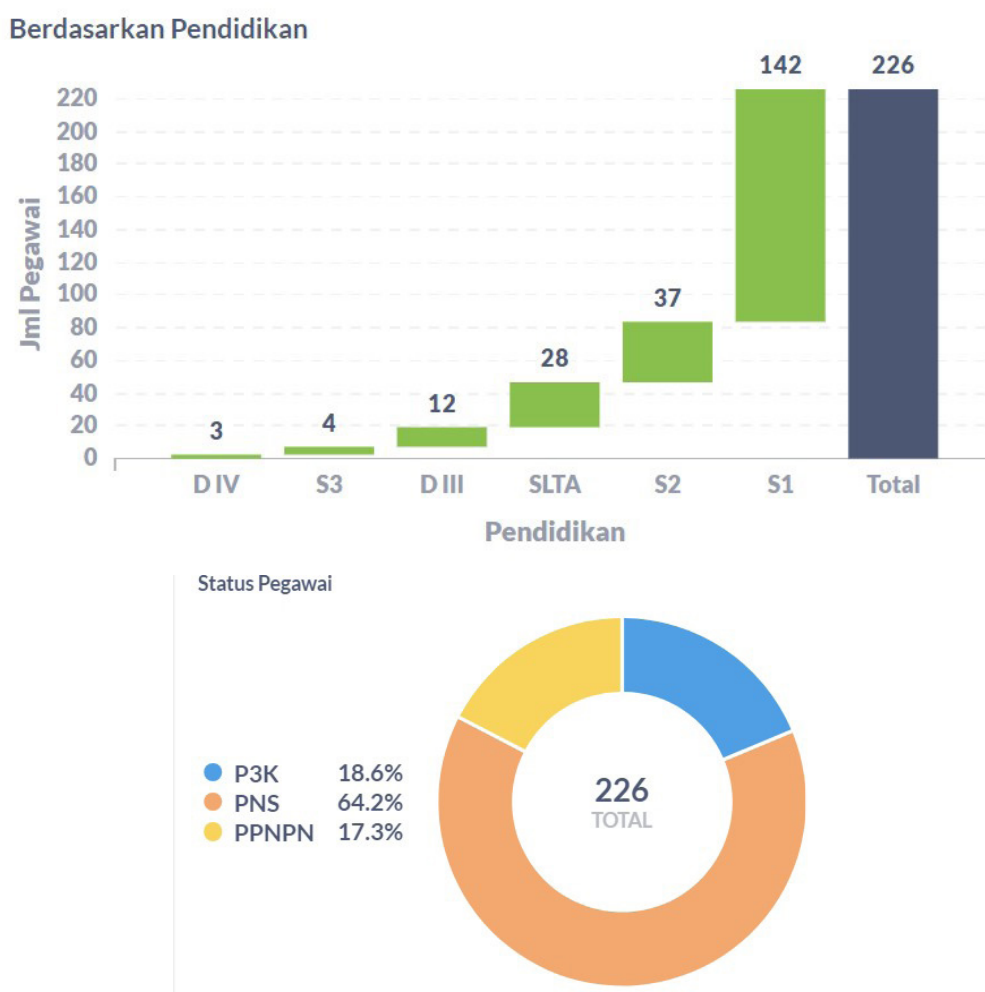
Subbagian Tata Usaha secara fungsional berada di bawah Bagian Keuangan dan Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggungjawab kepada pusat.

B. PETA WILAYAH KERJA

Hingga saat ini, BPJPH belum memiliki satuan kerja di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh 34 Satuan Tugas Layanan JPH Provinsi.

C. DATA PEGAWAI

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia/pegawai. Untuk menjalankan fungsinya, BPJPH didukung oleh 226 orang pegawai baik dari unsur ASN sebanyak 187 orang yang terdiri dari 145 orang PNS (64,2%) dan 42 orang PPPK (18,6%) serta Non ASN (PPNPN) sebanyak 39 orang (17,3%). Berikut gambaran data pegawai BPJPH berdasarkan kualifikasi pendidikan.



Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai ASN/Non ASN berdasarkan Pendidikan dan Status

sumber : olap kepegawaian, 2024

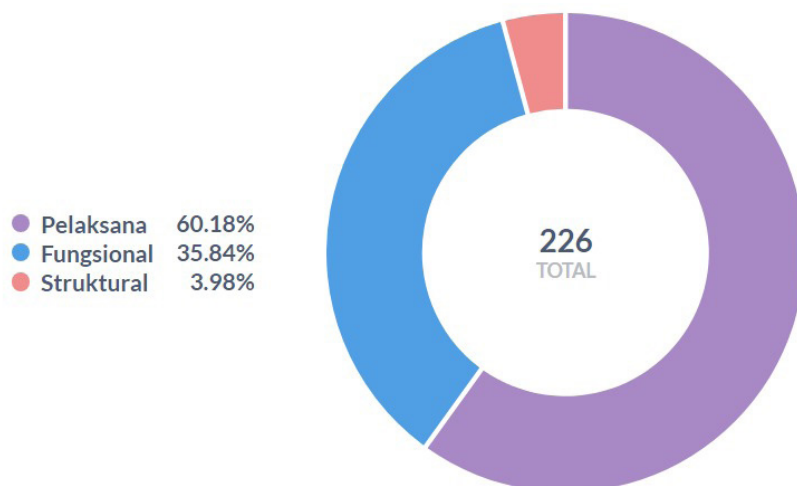
Berdasarkan gambar 2 di atas diketahui bahwa pegawai BPJPH memiliki kualifikasi pendidikan terbanyak pada Strata 1 yaitu 142 orang, sedangkan terendah pada Diploma III sebanyak 3 orang.

Sementara jika dilihat jumlah pegawai BPJPH berdasarkan unit kerja, paling banyak ditempatkan di Sekretariat sebanyak 96 orang, dikarenakan adanya fungsi pelayanan kantor. Sedangkan paling sedikit di Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal sebanyak 42 orang dan Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal sebanyak 42 orang. Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui juga jumlah pegawai BPJPH berdasarkan kelompok jabatan, bahwa pelaksana memiliki proporsi jumlah paling banyak sebesar 60,18% dari jabatan fungsional dan struktural.

Berdasarkan Unit Kerja

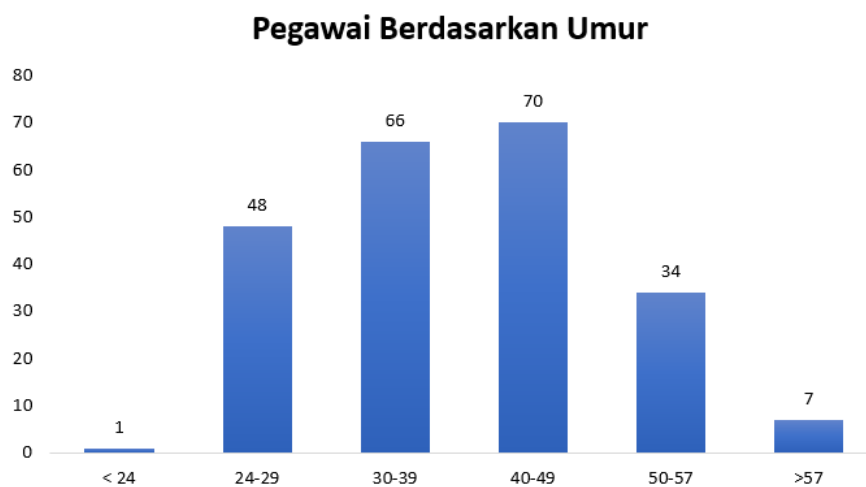
Unit Kerja	Jml Pegawai
Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	96
Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	45
Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal	42
Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	42
Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	1

Berdasarkan Kelompok Jabatan



Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai ASN/Non ASN berdasarkan Unit Kerja dan Kelompok Jabatan

sumber : olap kepegawaian, 2024



Gambar 4. Grafik Jumlah Pegawai ASN/Non ASN berdasarkan Pangkat/Golongan dan Umur/Usia

sumber : olap kepegawaian, 2024

Berdasarkan pangkat/golongan, pegawai BPJPH paling banyak memiliki pangkat/golongan III/a yaitu sebanyak 56 orang. Sedangkan paling sedikit memiliki pangkat/golongan IV/e sebanyak 1 orang. Jika berdasarkan umur/usia, pegawai BPJPH memiliki umur/usia paling banyak di rentang usia 40-49 tahun yaitu sebanyak 70 orang. Sedangkan usia di rentang >57 tahun sebanyak 7 orang.

BAB III

PERENCANAAN KINERJA PROGRAM & ANGGARAN TAHUN 2024

A. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024, BPJPH memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp340.677.831.000,- (*Tiga ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*). Selanjutnya, pada tanggal 29 Desember 2023, melalui surat Menteri Keuangan Nomor: S-1082/MK.02/2023 menyampaikan perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. BPJPH mengalami penyesuaian pagu dengan jumlah anggaran yang diblokir AA sebesar Rp55.445.751,000,-. Selain itu, BPJPH mendapatkan tambahan blokir administrasi sebesar Rp13.648.406.000,-, sehingga Pagu yang aktif digunakan sebesar Rp275.583.674.000,- atau 80,89%. Berikut tabel Pagu Alokasi Anggaran dan Pagu Blokir BPJPH Tahun 2024.

Tabel 1. Pagu Alokasi Anggaran dan Pagu Blokir BPJPH Tahun 2024 (dalam ribuan rupiah)

No	Kegiatan	Pagu	Blokir Administrasi	Blokir AA	Pagu Aktif
1	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	230.407.544	-	46.000.000	184.407.544
2	Pembinaan dan Pengawasan JPH	24.523.129	-	4.500.000	20.023.129
3	Kerjasama dan Standardisasi Halal	22.766.657	-	4.945.751	17.820.906
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	62.980.501	13.648.406	-	49.332.095
Total		344.677.831	13.648.406	55.445.751	275.583.674

B. SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama R.I. periode tahun 2020-2024, maka telah ditetapkan 6 (enam) tujuan sekaligus 13 sasaran strategis yang akan didukung oleh seluruh eselon I Pusat. BPJPH mendukung pelaksanaan 2 (dua) dari 6 (enam) tujuan Kementerian Agama di atas, yaitu: 1) penguatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan; dan 2) peningkatan budaya birokrasi

pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, BPJPH memiliki 3 (tiga) sasaran program dan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran program sesuai dengan Rencana Strategis BPJPH Tahun 2020-2024.

Tabel 2. Tabel Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	72,00
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100,00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100,00
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100,00
3	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	100,00
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	81,00
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80,00
		d. Nilai Maturitas SPIP	4,00
		e. Indeks Profesionalitas ASN	83,00

C. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Agama, ditetapkan besaran Rincian Output dan Anggaran berdasarkan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana kerja BPJPH tahun 2024 disusun sebagai bagian dari Rencana Kerja Kementerian Agama tahun 2024 yang berisi kegiatan-kegiatan prioritas dalam rencana kerja pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab BPJPH. Penyusunan Renja BPJPH mengikuti tahapan yang dilaksanakan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, terdiri dari Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran.

BPJPH telah menyusun rencana program dan anggaran tahun 2024, dengan total anggaran sebesar 340.677.831.000,- dialokasikan untuk 10 kegiatan Prioritas, yaitu: (1) program 1 juta sertifikat halal gratis melalui pernyataan halal pelaku usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil (*self declare*); (2) Sosialisasi sertifikasi halal melalui Wajib Halal Oktober (WHO) 2024; (3) Pembinaan dan pelatihan *stakeholder* JPH seperti Pendamping Proses Produk Halal (PPH), Auditor Halal, dan Penyelia Halal; (4) Mitigasi dan pengawasan JPH terpadu memperluas; (5) Akselerasi rekognisi produk halal impor; (6) Pendampingan Sertifikasi jasa penyembelihan pada Rumah Potong Hewan (RPH)/ Ruminansia dan Rumah Potong Unggas (RPU); (7) Kerjasama dengan mitra strategis baik dari dalam maupun luar negeri; (8) Pengembangan aplikasi SiHalal melalui *Block Chain* dan *Artificial Intelligence* (AI); (9) Penguatan Program Prioritas/ Direktif Kementerian Agama (Moderasi Beragama, Transformasi Digital dan Kehumasan); dan (10) Penguatan layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH. Berikut Rincian Output (RO) pada Renja BPJPH Tahun 2024 beserta targetnya.

Tabel 3. Rincian Output dan Target Rencana Kerja (Renja) BPJPH Tahun 2024

Kode/Program	Kode/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran	Fisik	
		Pagu	Satuan	Target
025.12.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2105 Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal			
	2105.PDC Sertifikat Produk	230.407.544.000	Sertifikat	1.010.000
	2105.PDC.001 Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	5.000.000.000	Sertifikat	10.000
	2105.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	225.407.544.000	Sertifikat	1.000.000
	2108 Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal			
	2108.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	24.523.129.000	Stkholder	37.000
	2108.QIC.001 Stakeholders JPH Yang Terawasi	7.302.068.000	Stkholder	2.000
	2108.QIC.002 Stakeholders JPH Yang Berkompeten	17.221.061.000	Stkholder	35.000
	2110 Kerja Sama dan Standardisasi Halal			
	2110.PEC Kerja Sama	22.766.657.000	Dokumen	42
	2110.PEC.001 MOU Jaminan Produk Halal	8.056.488.000	Dokumen	20
	2110.PEC.002 Standard Jaminan Produk Halal	7.140.182.000	Dokumen	12
	2110.PEC.003 Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	7.569.987.000	Dokumen	10
025.12. WA/Program Dukungan Manajemen	2111/Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH	62.980.501.000		78
	2111CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	14.000.000.000		
	2111.EBA.962 Layanan Sarana dan Prasarana TIK	14.000.000.000	Layanan	1
	2111EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	47.378.904.000	Layanan	1
	2111.EBA.962 Layanan Umum	10.002.737.000	Layanan	1
	2111.EBA.994 Layanan Perkantoran	37.376.167.000	Layanan	1
	2111EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.601.597.000	Unit	77
	2111.EBB.951 Layanan Sarana Internal	600.000.000	Unit	11
	2111.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1.001.597.000	Unit	66
	TOTAL	340.677.831.000		

D. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2024

Alokasi pendanaan Prioritas Nasional juga fokus pada kegiatan yang mendukung revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, antara lain terkait restrukturisasi mesin/peralatan industri perusahaan dan pengembangan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sedangkan untuk mendorong penguatan daya saing usaha, dukungan pendanaan akan difokuskan pada pendataan lengkap koperasi dan usaha kecil, mikro dan menengah, serta dukungan untuk sertifikasi halal.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, arah kebijakan BPJPH menyesuaikan dengan agenda-agenda yang telah ditetapkan Presiden RI sebagai Prioritas Nasional (PN) sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Prioritas Nasional yang selaras dengan tugas fungsi BPJPH adalah Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan atau PN-1 dan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan atau PN-4. Matrik Pembangunan RKP Tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPJPH, dapat dilihat pada tabel 4, 5, dan 6.

Tabel 4. Matriks Pembangunan RKP Tahun 2024

PN- 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
(Pro-P: Penguatan Regulasi dan Fasilitasi Usaha bagi Industri Halal)

Prioritas Nasional (PN)/Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.06.05.01 PRO-P: Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	01 - Terlaksananya kepastian hukum berusaha dan investasi	01 - Jumlah rekomendasi kebijakan harmonisasi regulasi terkait perizinan berusaha di tingkat pusat dan daerah	5	2 rekomendasi kebijakan	69.826,9	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.06.05.02 PRO-P: Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi	01 - Terlaksananya fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di wilayah I,II,III, IV, dan V	5	85 perusahaan	647.590,8	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
01.06.05.03 PRO-P: Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	01 - Meningkatnya jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan	01 - Perusahaan besar dan menengah yang mendapatkan pemahaman tata cara pengesahan ePP	5	1.800 badan usaha	740.399,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
01.06.06 KP: Pengembangan Industri Halal	01 - Terlaksananya pengembangan industri halal	01 - Jumlah sektor industri halal yang difasilitasi	5	3 sektor industri	64.303,3	
01.06.06.01 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Fasilitasi Usaha bagi Industri Halal	01 - Tersedianya regulasi dan fasilitasi usaha bagi penguatan industri halal	01 - Kebijakan pemberdayaan industri halal	5	1 rekomendasi kebijakan	24.762,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Jumlah sertifikat halal yang diterbitkan	5	1.010.000 sertifikat		

Sumber : Perpres Nomor 52 Tahun 2023 tentang RKP Tahun 2024

Tabel 5. Matriks Pembangunan RKP Tahun 2024

PN- 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
(Pro-P: Penguatan Pelaku Industri Halal)

Prioritas Nasional (PN)/Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arah Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.06.06.02 PRO-P: Penguatan Pelaku Industri Halal	01 - Terselenggaranya fasilitasi pemerintah untuk penguatan pelaku industri halal	01 - Jumlah industri halal yang difasilitasi dan dibina	5	6.070 industri/ lembaga	25.721,1	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.06.03 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Industri Halal	01 - Beroperasinya kawasan industri tematik halal	01 - Jumlah kawasan industri tematik halal yang beroperasi	5	5 lokasi	8.120,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.06.06.04 PRO-P: Kerjasama Internasional Industri Halal	01 - Terlaksananya fasilitasi ekspor dan kerja sama internasional terkait industri halal	01 - Jumlah promosi produk industri halal berskala internasional	5	7 kegiatan promosi	5.700,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.06.06.05 PRO-P: Pengembangan Pariwisata Halal	01 - Terlaksananya pengembangan pariwisata halal	01 - Jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi terkait industri halal dan ekonomi syariah	5	275 UMKM	0,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.06.06 PRO-P: Penguatan Halal Value Chain	01 - Penguatan klusterisasi dan industrialisasi produk halal dalam proses hilirisasi	01 - Jumlah fasilitasi kerja sama industri dalam rangka rantai nilai dan rantai pasok halal	5	2 kegiatan	0,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.07 PP: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Neraca perdagangan barang	5	47,2-49,5 US\$ miliar	631.825,2	
		02 - Pertumbuhan ekspor nonmigas	5	4,5-6,8 %		
		03 - Jumlah wisatawan mancanegara	5	9,5-14,3 juta kunjungan		
		04 - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	5	1.250-1.500 juta perjalanan		

Sumber : Perpres Nomor 52 Tahun 2023 tentang RKP Tahun 2024

Tabel 6. Matriks Pembangunan RKP Tahun 2024

Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

(Pro-P: Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal)

Prioritas Nasional (PN)/Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (PRO-P)	Sasaran	Indikator	Dukungan Terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.03.04.01 PRO-P: Peningkatan Fasilitas Pelayanan Keagamaan	01 - Terwujudnya fasilitas pelayanan keagamaan	01 - Jumlah kitab suci dan sarana peribadatan yang difasilitasi (unit)	1	375.000 unit	592.787,7	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.04.02 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga	01 - Terwujudnya pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga	01 - Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta ya sukhaya (keluarga)	1	1.819.500 keluarga	298.923,2	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.04.03 PRO-P: Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	01 - Terwujudnya penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal	01 - Persentase produk yang tersertifikasi halal	1	72 %	277.697,3	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.04.04 PRO-P: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	01 - Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah	01 - Persentase jemaah haji yang mendapatkan pelayanan haji sesuai standar	1	87 %	994.438,4	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Petugas haji profesional	1	88 %		
04.03.05 KP: Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	01 - Terwujudnya pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan	01 - Persentase penggunaan dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	1	55 %	94.581,1	
04.03.05.01 PRO-P: Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan	01 - Terwujudnya pemberdayaan dana sosial keagamaan	01 - Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan	1	31,07 %	28.600,0	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.05.02 PRO-P: Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat	01 - Terwujudnya pengembangan kelembagaan ekonomi umat	01 - Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan	1	75 %	61.219,2	KEMENTERIAN AGAMA

Sumber : Perpres Nomor 52 Tahun 2023 tentang RKP Tahun 2024

Dalam penguatan regulasi dan fasilitasi usaha bagi industri halal, indikator diukur melalui jumlah sertifikat halal yang diterbitkan dengan target sebanyak 1.010.000 sertifikat. Disamping itu, dalam penguatan pelaku industri halal, indikator diukur melalui jumlah industri halal yang difasilitasi dan dibina dengan target 6.070 industri atau lembaga. Sedangkan dalam penguatan penyelenggaraan JPH, indikator diukur melalui persentase produk yang tersertifikasi halal dengan target sebesar 72%.

Dalam pelaksanaannya, dari tujuh Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2024 didukung oleh 44 proyek prioritas strategis *Major Project* yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. *Major Project*, diposisikan sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RKP, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahunannya. Indikasi pendanaan dan besaran *Major Project* dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan memperhatikan kesiapan pelaksanaan, sumber pendanaan, serta direktif presiden. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan *Major Project* terlaksana lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan kebutuhan percepatan pencapaian target pembangunan. BPJPH mendukung *Major Project* pengelolaan terpadu UMKM dengan target pada Tahun 2024 sebanyak 1.010.000 Sertifikat Halal.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024

A. REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2024

Realisasi Anggaran BPJPH Triwulan I TA.2024 berdasarkan data OMSPAN, BPJPH telah merealisasikan anggaran sebesar Rp75.803.074.027,- (*tujuh puluh lima miliar delapan ratus tiga juta tujuh puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah*) atau 22,25% dari total pagu. Berdasarkan tabel 7, realisasi anggaran terbesar pada kegiatan Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal yaitu sebesar Rp59.285.918.297,- atau 25,73% dan realisasi anggaran terendah pada kegiatan Kerja Sama dan Standardisasi Halal yaitu sebesar Rp2.115.355.060,- atau 9,29%. Adapun realisasi anggaran pada BPJPH adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	230.407.544.000	59.285.918.297	25,73%
2	Pembinaan dan Pengawasan JPH	24.523.129.000	4.352.895.817	17,75%
3	Kerjasama dan Standardisasi Halal	22.766.657.000	2.115.355.060	9,29%
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis			
4	Lainnya	62.980.501.000	10.048.904.853	15,96%
Total		340.677.831.000	75.803.074.027	22,25%

B. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TRIWULAN I TAHUN 2024

Keberhasilan capaian sasaran program Triwulan I diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja BPJPH Tahun 2024. Berikut capaian sasaran program dan indikator kinerja sasaran program Triwulan I Tahun 2024.

Tabel 8. Realisasi Sasaran Program Triwulan I Tahun 2024

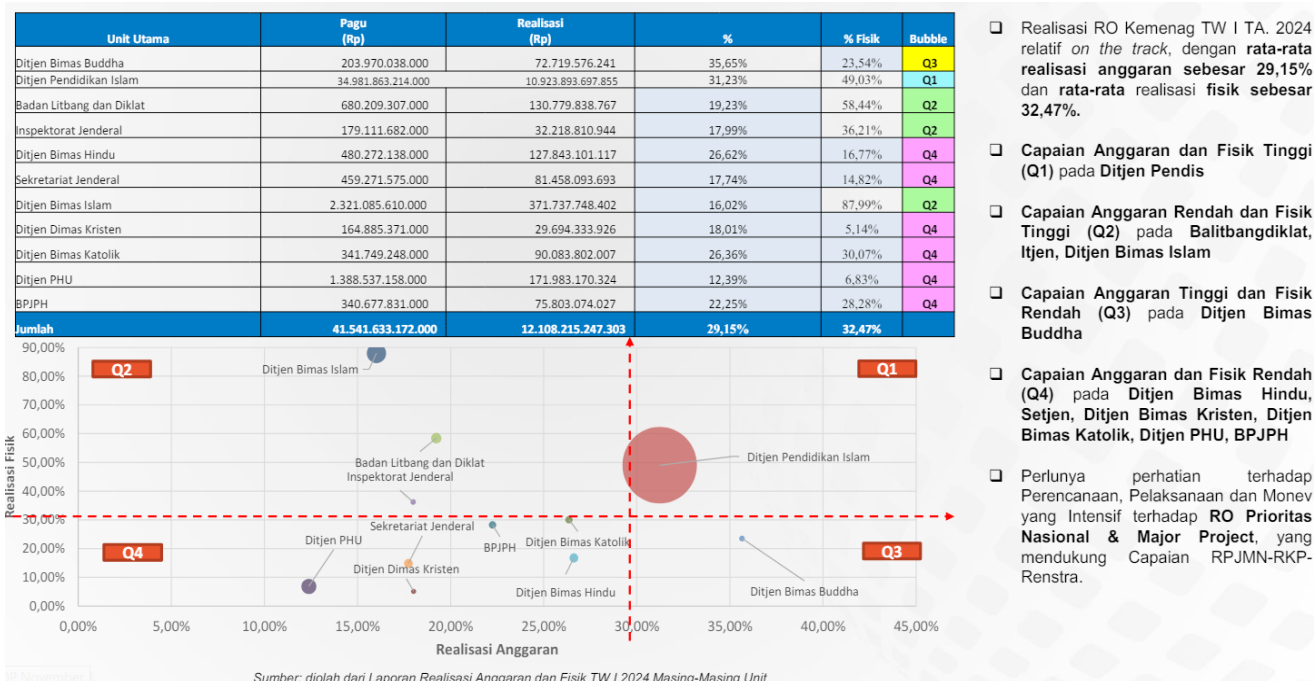
No	Sasaran Dan Indikator Kinerja	Target Perkin	Realisasi Perkin	Capaian Kinerja (%)
	Target Renstra			
1	Sasaran: Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal Indikator: Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan Target Renstra Kementerian: 72	72	70.85	98.4%
2	Sasaran: Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal Indikator: Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan Target Renstra Kementerian: 100	100	100	100%
3	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal Indikator: Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM Target Renstra Kementerian: 100	100	100	0%
4	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal Indikator: Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM Target Renstra Kementerian: 100	100	100	100%
5	Sasaran: Meningkatnya tata kelola unit organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel Indikator: Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan Target Renstra Kementerian: 100	100	80	80%
6	Sasaran: Meningkatnya tata kelola unit organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel Indikator: Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) Target Renstra Kementerian: 81	81	0	0%
7	Sasaran: Meningkatnya tata kelola unit organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel Indikator: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Target Renstra Kementerian: 80	80	0	0%
8	Sasaran: Meningkatnya tata kelola unit organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel Indikator: Nilai Maturitas (SPIP) Target Renstra Kementerian: 4	4	0	0%
9	Sasaran: Meningkatnya tata kelola unit organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel Indikator: Indeks Profesionalitas ASN Target Renstra Kementerian: 83	83	0	0%

Pelaksanaan sasaran program pada Triwulan I Tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yang telah memenuhi target sebesar 100% dan indikator kinerja lainnya masih dalam proses pelaksanaan. Berikut capaian dari pelaksanaan sasaran program pada Triwulan I Tahun 2024.

- a. Sasaran Program 1 : Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal. Pada program ini, capaian kinerja 98.4% dari total pendaftaran, dikarenakan jumlah pada Triwulan I ini sebanyak 293.954 sertifikat.
- b. Sasaran Program 2 : Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal. Pada program ini, capaian kinerja 100% dikarenakan kanal informasi pengaduan cukup memadai dan layanan konsultasi tatap muka melalui PTSP sebanyak 13.445 pengunjung.
- c. Sasaran Program 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal. Pada program ini, capaian belum memenuhi target dikarenakan sistem pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal Luar Negeri belum berjalan.
- d. Sasaran Program 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal. Pada program ini, capaian kinerja 100% dikarenakan sesuai aturan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja No 6 Tahun 2022 tentang tenggang waktu sertifikasi halal reguler dan *self declare*.
- e. Sasaran Program 5 : Meningkatnya tata kelola unit organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel. Pada program ini, capaian kinerja belum memenuhi target dikarenakan laporan Tindak Lanjut yang dilakukan adalah Tindak Lanjut hasil pemeriksaan 2023.
- f. Sasaran Program 6 : Meningkatnya tata kelola unit organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel. Pada program ini, belum berjalan dikarenakan tidak adanya maturitas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PMPRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas PMPRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map reformasi birokrasi 2020-2024.
- g. Sasaran Program 7 : Meningkatnya tata kelola unit organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel. Pada program ini, belum berjalan dikarenakan pada Triwulan I belum ada penilaian SAKIP.
- h. Sasaran Program 8 : Meningkatnya tata kelola unit organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel. Pada program ini, belum berjalan dikarenakan pada Triwulan I belum ada penilaian maturitas SPIP.
- i. Sasaran Program 9 : Meningkatnya tata kelola unit organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel. Pada program ini, belum berjalan dikarenakan Sesuai Permenpan dan RB No 38 tahun 2018 tentang Pengukuran indeks profesionalitas bahwa nilai indeks dilaksanakan pada triwulan IV.

C. CAPAIAN RENCANA KERJA (RENJA) TRIWULAN I TAHUN 2024

Capaian Rencana Kerja (Renja) BPJPH Triwulan I menggambarkan capaian Rincian Output (RO). Berikut ini capaian anggaran dan fisik dari RO. Berikut ini capaian RO dan Anggaran per Unit Eselon I berdasarkan pemantauan yang dilakukan Bappenas.



- Realisasi RO Kemenag TW I TA. 2024 relatif *on the track*, dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 29,15% dan rata-rata realisasi fisik sebesar 32,47%.
- Capaian Anggaran dan Fisik Tinggi (Q1) pada Ditjen Pendis
- Capaian Anggaran Rendah dan Fisik Tinggi (Q2) pada Balitbangdiklat, Itjen, Ditjen Bimas Islam
- Capaian Anggaran Tinggi dan Fisik Rendah (Q3) pada Ditjen Bimas Buddha
- Capaian Anggaran dan Fisik Rendah (Q4) pada Ditjen Bimas Hindu, Setjen, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen PHU, BPJPH
- Perlunya perhatian terhadap Perencanaan, Pelaksanaan dan Money yang Intensif terhadap RO Prioritas Nasional & Major Project, yang mendukung Capaian RPJMN-RKP-Renstra.

Gambar 5. Capaian Rincian Output Kementerian Agama per Unit Utama Triwulan I Tahun 2024

Sumber : Evaluasi Triwulan I Tahun 2024, Bappenas

Realisasi RO Kemenag TW I TA. 2024 relatif *on the track*, dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 29,15% dan rata-rata realisasi fisik sebesar 32,47%. Berdasarkan hal tersebut, BPJPH berada pada Q4 (kuadran 4) yang berarti Capaian Anggaran Rendah dan Fisik Rendah. Perlunya akselerasi penyerapan anggaran dan fisik pada Triwulan II. Berikut ini tingkat kepatuhan pelaporan data E Money yang dipantau oleh Bappenas.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
KEMENTERIAN AGAMA	41,7%	41,7%	41,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sekretariat Jenderal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Inspektorat Jenderal	85,71%	85,71%	85,71%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	52,4%	52,4%	52,4%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ditjen Pendidikan Islam	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	100%	100%	100%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	100%	100%	100%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	61,7%	61,7%	61,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	42,9%	42,9%	42,9%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	100%	100%	100%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Gambar 6. Capaian Rincian Output Kementerian Agama per Unit Utama Triwulan I Tahun 2024

Sumber : Evaluasi Triwulan I Tahun 2024, Bappenas

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa BPJPH telah melakukan pengisian data pelaporan e-Monev secara lengkap untuk level RO. Hal ini menggambarkan tingkat kepatuhan 100% pada BPJPH

terhadap waktu penyelesaian pelaporan e-Monev Bappenas. Secara rinci, target dan capaian Renja BPJPH Triwulan I Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 9. Realisasi Anggaran dan Fisik Rincian Output Tahun 2024

Kode/ Program	Kode/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran			Fisik			
		Pagu	Realisasi	% Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
025.12.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2105 Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal							
	2105.PDC Sertifikat Produk	230.407.544.000	59.285.918.297	25,73	Sertifikat	1.010.000	293.954	29,10
	2105.PDC.001 Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	5.000.000.000	760.000	0,02	Sertifikat	10.000	4.664	46,64
	2105.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	225.407.544.000	59.285.158.297	26,30	Sertifikat	1.000.000	289.290	28,93
	2108 Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal							
	2108.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	24.523.129.000	4.352.895.817	17,75	Stkholder	37.000	2.167	5,86
	2108.QIC.001 Stakeholders JPH Yang Terawasi	7.302.068.000	780.819.417	10,69	Stkholder	2.000	42	2,10
	2108.QIC.002 Stakeholders JPH Yang Berkompeten	17.221.061.000	3.572.076.400	20,74	Stkholder	35.000	2.125	6,07
	2110 Kerja Sama dan Standardisasi Halal							
	2110.PEC Kerja Sama	22.766.657.000	2.115.355.060	9,29	Dokumen	42	5	11,90
	2110.PEC.001 MOU Jaminan Produk Halal	8.056.488.000	1.209.633.441	15,01	Dokumen	20	1	5,00
	2110.PEC.002 Standard Jaminan Produk Halal	7.140.182.000	501.499.562	7,02	Dokumen	12	-	0,00
	2110.PEC.003 Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	7.569.987.000	404.222.057	5,34	Dokumen	10	4	40,00
025.12. WA/Program Dukungan Manajemen	2111/Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH	62.980.501.000	10.048.904.853	15,96		78	29	37,18
	2111.ICAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	14.000.000.000						
	2111.EBA.962 Layanan Sarana dan Prasarana TIK	14.000.000.000	52.000.000	0,37	Layanan	1	1,00	1,00
	2111.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	47.378.904.000	9.859.754.853	20,81	Layanan	1	1,00	100,00
	2111.EBA.962 Layanan Umum	10.002.737.000	1.783.625.949	17,83	Layanan	1	1,00	1,00
	2111.EBA.994 Layanan Perkantoran	37.376.167.000	8.076.128.904	21,61	Layanan	1	1,00	1,00
	2111.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.601.597.000	189.150.000	11,81	Unit	77	28	36,36
	2111.EBB.951 Layanan Sarana Internal	600.000.000	0	0,00	Unit	11	0	0,00
	2111.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1.001.597.000	189.150.000	18,88	Unit	66	28	42,42
	TOTAL	340.677.831.000	75.803.074.027	22,25				

Berikut penjelasan matriks realisasi anggaran dan fisik berdasarkan RO pada Triwulan I Tahun 2024.

a. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

Di triwulan I tahun 2024, BPJPH telah menerbitkan sertifikat sebanyak 293.954 sertifikat atau 29,10% dari target 1.010.000 sertifikat, yang terdiri atas sertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian sebanyak 4.664 sertifikat dan sertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha sebanyak 289.290 sertifikat. Sementara, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp59.285.918.297,- atau 25,73%.

Target Pembinaan dan Pengawasan JPH sebanyak 37.000 lembaga, telah terealisasi sebanyak 2.167 lembaga atau 5,86%, yang terdiri atas stakeholder JPH yang terawasi sebanyak 42 stakeholder dan stakeholder JPH yang berkompeten sebanyak 2.125 stakeholder. Sementara, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp4.352.895.817,- atau 17,75%. Capaian realisasi anggaran tidak sebanding dengan realisasi fisik, dikarenakan pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan jadwal.

Selain itu, Kerjasama dan Standardisasi halal telah melaksanakan 5 dokumen dari target 42 dokumen atau 11,90%. Capaian realisasi anggaran sebesar Rp2.115.355.060,- atau 9,29%. Pada RO standard JPH belum memenuhi target dikarenakan Triwulan I masih proses persiapan penyusunan dokumen standard.

b. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen melalui layanan kesekretariatan mempunyai tugas dan fungsi mendukung pencapaian target pada program teknis/layanan. Salah satu target yang telah dicapai adalah program transformasi digital melalui pengembangan modul dan fitur pada aplikasi SiHalal, layanan *Omni Communication Asistance (OCA)*, dukungan sosialisasi melalui workshop aplikasi SiHalal kepada pelaku usaha dan masyarakat, serta program kehumasan. Capaian pelaksanaan Program Dukungan Manajemen telah melebihi target yang ditetapkan dikarenakan adanya optimalisasi anggaran untuk pengadaan belanja modal untuk menambah aset BPJPH. Berdasarkan tabel 8, kinerja anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar 15,96% dan kinerja fisik melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 37,18%.

D. CAPAIAN RKP TRIWULAN I TAHUN 2024

Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menggambarkan capaian Prioritas Nasional dan Indikatornya. Berikut ini capaian RKP dari kegiatan Prioritas Nasional.

Tabel 10. Capaian RKP Triwulan I Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industri-alisasi	Pengembangan Industri Halal	Penguatan Regulasi dan fasilitasi Usaha bagi Industri Halal	Tersedianya Regulasi dan Fasilitasi Usaha bagi Penguatan Industri Halal	Jumlah Sertifikat Halal yang diterbitkan	1.010.000 Sertifikat	293.954 Sertifikat	29,10
2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industri-alisasi	Pengembangan Industri Halal	Penguatan Pelaku Industri Halal	Terselenggaranya Fasilitasi Pemerintah Untuk Penguatan Pelaku Industri halal	Jumlah Industri Halal yang difasilitasi dan dibina	6.070 Industri	1443 Industri	23,77
3	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Penguatan Penyelenggaraan JPH	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan JPH	Persentase Produk yang Tersertifikasi Halal	72%	70.85%	98,40

Terdapat 3 (tiga) komponen utama Prioritas Nasional yang dituangkan di Program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Kementerian Agama khususnya penyelenggaraan JPH, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Indikatornya ialah jumlah sertifikat halal yang telah terbit. Pada tabel 10, realisasi sertifikat halal terbit pada Triwulan I berjumlah 293.954 sertifikat. Capaian indikator ini pada Triwulan I sebesar 29,10%.
2. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Indikatornya ialah jumlah industri halal yang difasilitasi dan dibina. Pada tabel 10, realisasi industri halal pada Triwulan I berjumlah 1.443 Industri. Capaian indikator ini pada Triwulan I sebesar 23,77%.
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Indikatornya ialah persentase produk yang bersertifikat halal. Pada tabel 10, realisasi persentase produk halal yang tersertifikasi halal sebesar 70,85%. Capaian indikator ini pada Triwulan I sebesar 98,40%.



BAB V

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

A. KENDALA

Secara umum kendala yang dihadapi BPJPH di Triwulan I tahun 2024 meliputi:

- a. Belum terbentuknya pengembangan organisasi BPJPH di Daerah

Layanan sertifikasi halal masih dilakukan secara sentralistik di BPJPH. Untuk mempercepat dan mendekatkan layanan sertifikasi halal kepada pelaku usaha diperlukan struktur organisasi BPJPH pada setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini diperlukan dalam mendukung layanan penyelenggaraan jaminan produk halal.

- b. Keterbatasan anggaran Sertifikasi Halal program Sertifikasi Halal dengan pernyataan Halal Pelaku Usaha (*Self Declare*)

Dalam rangka memenuhi target penahapan pertama kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha pada tahun 2024, BPJPH harus didukung dengan sumber daya anggaran yang memadai. Tahun 2024, BPJPH memiliki kuota sertifikasi halal gratis sebanyak 921.956 sertifikat, dimana terdapat tunggakan pembayaran sertifikasi halal tahun 2023 sebanyak 247.972. Hal ini menimbulkan berkurangnya capaian output sertifikasi halal pada tahun 2024.

- c. Perubahan waktu pelaksanaan kegiatan dari *stakeholder* terkait

Dalam melaksanakan layanan sertifikasi halal, BPJPH melibatkan *stakeholder* lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Stakeholder yang terlibat secara langsung seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan melibatkan banyak *stakeholder* mengakibatkan BPJPH harus selalu berkoordinasi dengan *stakeholder*.

- d. Blokir administrasi dan *Automatic Adjustment* (AA) pada anggaran

Terdapat blokir administrasi berupa layanan konsultasi melalui *Omni Communication Assistance* (OCA) dan pengembangan SIHalal. Selain itu, terdapat blokir AA pada sertifikasi halal yang menyebabkan penutupan layanan pendaftaran sertifikasi halal dikarenakan kuota telah habis digunakan.

- e. Belum memiliki data yang komprehensif terkait pelaku usaha atau asosiasi yang diperlukan untuk melakukan pembinaan JPH

Perlu diketahui bahwa proses pengajuan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*) memerlukan data yang bersumber dari data *Online Single Submission* (OSS) Kementerian Investasi/

BKPM berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, ditemukan kendala pada pelaku usaha khususnya mikro dan kecil masih banyak yang belum melek teknologi, sehingga data pelaku usaha belum terdaftar pada OSS. Pembinaan kepada pelaku usaha belum dapat terjangkau kepada seluruh pelaku usaha, dikarenakan belum terdapat satu data pelaku usaha yang terintegrasi.

f. Proses penyusunan dokumen kerjasama memerlukan waktu

Dalam proses kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain terdiri dari beberapa bentuk yang berurutan yaitu: 1) Audiensi, 2) MoU, dan 3) PKS. Pada setiap prosesnya diperlukan diskusi yang intensif dan membutuhkan waktu, dikarenakan rawan adanya *Conflict of Interest*.

g. Penyusunan pedoman JPH membutuhkan banyak informasi dalam pembuatannya

Proses penyusunan dokumen standard/pedoman JPH memerlukan koordinasi intensif dan informasi dengan beberapa *stakeholder* terkait. Hal ini membutuhkan waktu dan sumber daya manusia yang memadai.

h. Akreditasi LPH/LHLN memerlukan komunikasi intensif

Akreditasi LPH/LHLN baik sebelum atau sesudah *assessment* memerlukan komunikasi yang intensif dengan pihak LPH/LHLN sehingga kecepatan penerbitan sertifikat Akreditasi bergantung juga pada keaktifan LPH/LHLN dalam memenuhi dan merevisi dokumen yang dibutuhkan.

B. TINDAKLANJUT/REKOMENDASI

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPJPH dalam menghadapi kendala/permasalahan tersebut, yaitu:

a. Melakukan koordinasi intensif kepada Kementerian PAN dan RB untuk percepatan struktur organisasi BPJPH di Daerah

BPJPH telah berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian PAN dan RB tentang percepatan struktur organisasi. Namun, penyelesaian struktur organisasi BPJPH di daerah menunggu penyelesaian perubahan struktur organisasi tingkat Kementerian Agama.

b. Menyampaikan surat pelaksanaan dan capaian Sertifikasi Halal Tahun 2023 dan 2024 kepada Kementerian Keuangan

BPJPH telah menyampaikan surat pelaksanaan sertifikasi halal tahun 2024 yang menggambarkan kondisi dan estimasi pelaksanaan sertifikasi halal. Namun, target penambahan sertifikasi halal tahun 2024 belum dapat dipenuhi oleh Kementerian Keuangan pada Triwulan I.

c. Meminta dan mengklarifikasi agenda kepada Pihak Eksternal

Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan telah dikoordinasikan dengan *stakeholder* terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah disusun

d. Berkoordinasi dengan Biro Humas data dan Informasi (HDI) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama untuk penyiapan data *Clearance*

BPJPH telah melakukan koordinasi percepatan penyelesaian *clearance* TIK pada Januari 2024. Namun, dalam penyelesaian tersebut memerlukan waktu dikarenakan perlunya persetujuan dokumen *clearance* dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bappenas.

- e. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait agar mendapatkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pembinaan JPH

Penyediaan data yang lengkap, mutakhir, dan akuntabel perlu diupayakan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan menjadi basis penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan, terutama dalam hal pemberian fasilitasi sertifikasi halal dan pembinaan JPH. BPJPH telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait data desa wisata sebagai target pembinaan dan sosialisasi sertifikasi halal.

- f. Melaksanakan Kegiatan Akselerasi Pembahasan dan Penandatanganan MoU/PKS dengan lebih dari 1 (satu) K/L

Dalam rangka percepatan penandatanganan MoU/ PKS, BPJPH melaksanakan kegiatan yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga.

- g. Menggunakan jasa konsultan/tim ahli pada bidangnya dalam pembuatan pedoman/standard

Dalam percepatan penyusunan dokumen standard, BPJPH telah menunjuk tim ahli yang dapat membantu pelaksanaan penyusunan dokumen dimaksud.

- h. Melaksanakan Kegiatan Akselerasi Layanan Akreditasi, Penandatanganan MRA dan Penyerahan Sertifikat LPH/LHLN

Dalam percepatan pelaksanaan akreditasi Lembaga, BPJPH melaksanakan kegiatan akselerasi layanan yang terdiri dari penandatanganan MRA dan penyerahan sertifikat, baik pada LPH maupun LHLN.



BAB VI

PENUTUP

Laporan Evaluasi Program dan Anggaran BPJPH Triwulan I Tahun 2024 disusun dalam rangka bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Triwulan I tahun 2024 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Program Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga. Sistem Monitoring bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta mengukur kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Secara umum, capaian kinerja kegiatan dan anggaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, dalam laporan ini kami juga mencantumkan analisis mengenai kendala-kendala tersebut beserta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

Pelaksanaan Hasil Evaluasi TW I TA.2024 agar menjadi perhatian dan masukan perbaikan agar capaian setiap triwulan agar dapat selalu *on track*. Berbagai macam permasalahan yang terjadi, diharapkan sudah dapat diidentifikasi untuk diselesaikan melalui optimalisasi strategi penyelesaian masalah agar tidak terulang permasalahan yang sama di triwulan berikutnya. Selain itu, RKP TA 2024 sebagai rencana pembangunan nasional di akhir periode RPJMN 2020-2024 perlu mendapat perhatian yang lebih intens. Perlu dilakukan upaya reviu dan evaluasi secara komprehensif terhadap progres capaian kinerja sasaran pembangunan sebagaimana yang dimuat dalam RKP TA 2024.

Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap program dan kegiatan yang mendukung sasaran pembangunan perlu dilakukan dengan turut memaksimalkan sinergi dari berbagai pihak. Untuk kemudian hasilnya dapat dilakukan mekanisme ‘bagi-pakai’ sebagai pertimbangan perencanaan pembangunan di periode selanjutnya.

Laporan evaluasi program anggaran diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja serta perbaikan di periode yang akan datang. Demikian Laporan evaluasi program anggaran BPJPH Triwulan I Tahun 2024 ini disusun agar dapat memberikan manfaat untuk BPJPH pada khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya.

LAMPIRAN



24 Januari 2024

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Saudi Food Drug Authority (SFDA) sepakat untuk membentuk tim teknis guna mengerucutkan kerja sama di antara kedua pihak dalam bidang Jaminan Produk Halal (JPH). Pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara BPJPH dan SFDA dalam kualitas JPH yang telah ditandatangani pada 19 Oktober 2023 lalu. Kesepakatan tersebut dicapai dalam bilateral meeting antara BPJPH dan SFDA yang dilakukan dalam rangkaian Makkah Halal Forum 2024 di kota Makkah, Rabu (25/1/2024). Hadir dalam pertemuan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, didampingi Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron B Ambary, Sekretaris BPJPH E.A Chuzaemi Abidin, dan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Abd Syakur. Delegasi Indonesia diterima oleh CEO SFDA Hisham bin Saad Al-Jadhey, didampingi oleh EAP of Research and Laboratory Ibrahim Al-Haidr, EAP of Planning and Excellence Khaled Al-Thenayan, VP for Operation Sector Sami Alsager, dan VP for Drug Sector Adel Alharf.



15 Februari 2024

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyosialisasikan penganggaran APBD untuk pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Sosialisasi digelar di kantor BPJPH secara hybrid dengan mengundang secara daring seluruh Satgas Layanan Jaminan Produk Halal seluruh Indonesia.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri Fernando H. Siagian, dan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Siti Aminah.



19 Februari 2024

BPJPH mengajak industri besar untuk berkolaborasi melaksanakan sosialisasi dan edukasi kewajiban sertifikasi halal yang akan diberlakukan mulai 18 Oktober 2024 mendatang. Sosialisasi kewajiban sertifikasi halal itu akan menyasar seluruh pelaku usaha dari mikro, kecil, menengah, hingga besar, serta stakeholder dan masyarakat luas. Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menjelaskan bahwa pada tahun ini sosialisasi kewajiban sertifikasi halal memang melibatkan lebih banyak stakeholder. Tujuannya agar ajakan bersertifikat halal tersampaikan secara masif kepada seluruh pelaku usaha dengan kategori produk termasuk dalam penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal.

Untuk itu BPJPH mengundang kurang lebih 84 perusahaan besar pada pertemuan koordinasi di Gedung BPJPH, Senin, (19/02/2024). BPJPH mengajak perusahaan ikut berpartisipasi secara kolaboratif untuk memberikan dukungan sosialisasi, publikasi, edukasi, literasi kewajiban sertifikasi halal yang akan diberlakukan Oktober 2024 nanti bagi produk makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, serta bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.



14 Maret 2024

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) bersama Satgas Layanan Jaminan Produk Halal (JPH) dan stakeholder terkait membuka layanan pendaftaran sertifikasi halal secara langsung di lapangan atau on the spot di 405 titik lokasi di 27 Provinsi. Layanan pendaftaran on the spot ini merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024, sebagai upaya jemput bola untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal ataupun sekadar ingin berkonsultasi terkait kewajiban sertifikasi halal.



16 Maret 2024

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham bersama Inspektur Jenderal Kemenag Faisal Ali Hasyim berkunjung ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diterima oleh Deputy Pengawasan Bidang PIP Bidang Polhukam BPKP Iwan Taufiq Purwanto beserta jajarannya. Pertemuan membahas pengawasan sebagai dukungan BPKP terhadap penyelenggaraan layanan sertifikasi halal BPJPH terutama bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK).



28 Maret 2024

Dalam rangka terus meningkatkan kualitas layanan sertifikasi halal, BPJPH menggelar koordinasi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, yang dilaksanakan melalui Silaturahmi Nasional BPJPH dengan Komisi Fatwa MUI Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan MPU Aceh.